

**ANALISIS SIMULTAN ANTARA PINJAMAN DAERAH DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

**Cindy Permata Sari Sinaga**

**01021281823174**

**Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**"ANALISIS SIMULTAN ANTARA PINJAMAN DAERAH DAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH SUMATERA SELATAN"**

Disusun Oleh

Nama : Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM : 01021281823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

**TANGGAL PERSETUJUAN**

**DOSEN PEMBIMBING**

Tanggal : 14 Juli 2022 .....

  
Ketua : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

Tanggal : 18 Juli 2022 .....

  
Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si  
NIP. 199004072018032001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### ANALISIS SIMULTAN ANTARA PINJAMAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh,

Nama : Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM : 01021281823174  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 02 Agustus 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 23 Agustus 2022

Ketua

Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

NIP. 197007162008012015

Anggota

Feny Marissa, S.E., M.Si

NIP. 199004072018032001

Anggota

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

NIP. 196007101987031003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

ASLI

JUR. EK. PEMBANGUNAN

31-8-2022

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM : 01021281823174  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Analisis Simultan Antara Pinjaman Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan.

Pembimbing : Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si

Anggota : Feny Marissa, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 02 Agustus 2022

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 31 Agustus 2022  
Pembuat pernyataan

**ASLI**  
JUR. EK. PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
31-8-2022



Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM. 01021281823174

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Simultan Antara Pinjaman Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan” sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai kendala dan hambatan. Akan tetapi, berkat dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang telah memberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu saya Sri Suryati, Adik saya Erna Feronica Sinaga, Abang saya Doan Eko Saputra dan Rico Fernando yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
3. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi dan dan Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si sebagai Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
4. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si dan Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf FE Unsri yang telah memberikan ilmunya serta membantu saya sewaktu masa perkuliahan.
7. Seluruh pihak Civitas Akademik Universitas Sriwijaya yang telah berkontribusi dalam membantu segala keperluan akademik saya.
8. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2018, khususnya B Sia Teh Kopi Susu Group yang selalu memberikan motivasi dan peluang rezeki.
9. Orang-orang terdekat saya Yuk Eris, Zaki, Naufal, Dwi, Novi dan Mona serta semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat selama proses pembelajaran dan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Dengan demikian, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Agustus 2022

Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM. 01021281823174

## ABSTRAK

### ANALISIS SIMULTAN ANTARA PINJAMAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA SELATAN

Oleh:

**Cindy Permata Sari Sinaga; Anna Yulianita; Feny Marissa**

Pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan simultan antara pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan dengan dana alokasi Umum, surplus/defisit anggaran, produk domestik regional bruto dan belanja modal sebagai variabel eksogen. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan periode penelitian yaitu tahun 2007-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *Two-Stage Least Square* (2SLS). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (a) terjadi hubungan simultan antara pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah dikarenakan pinjaman daerah dicatat sebagai penerimaan, (b) dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pinjaman daerah dikarenakan kecilnya pengalokasiannya, sedangkan surplus/defisit anggaran memiliki pengaruh terhadap pinjaman daerah dan (c) produk domestik regional bruto dan belanja modal sama-sama memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan kedua variabel ini mampu menopang perekonomian.

**Kata Kunci:** *Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Surplus/Defisit Anggaran, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal*

Ketua



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

Anggota



Feny Marissa, S.E., M.Si  
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## ABSTRACT

### SIMULTANEOUS ANALYSIS BETWEEN REGIONAL LOANS AND REGIONAL REVENUE OF SOUTH SUMATERA

By:

**Cindy Permata Sari Sinaga; Anna Yulianita; Feny Marissa**

Regional loans can be used as an alternative financing for local governments with the aim of accelerating economic growth. This study aims to see whether there is a simultaneous relationship between regional loans and original local government revenue in South Sumatera with the general allocation fund, budget surplus/deficit, gross domestic product and capital expenditures as exogenous variables. The data used in this study is secondary data with a research period of 2007-2021. The analysis technique used is Two-Stage Least Square (2SLS) analysis. The results of this study indicate that (a) there is a simultaneous relationship between regional loans and original local government revenue because regional loans are recorded as revenues, (b) general allocation fund has no effect on regional loans due to the small allocation of them, while the budget surplus/deficit has an effect on regional loans and (c) gross domestic product and capital expenditure both have an influence on original local government revenue because these two variables are able to support economic.

**Keywords:** *Regional Loans, Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, Budget Surplus/Deficit, Gross Domestic Product, Capital Expenditure*

First Advisor



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si  
NIP. 197007162008012015

Member



Feny Marissa, S.E., M.Si  
NIP. 199004072018032001

Acknowledge by,  
Head of Development Economics Department

  
29/08/22

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si  
NIP. 197304062010121001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Cindy Permata Sari Sinaga  
NIM : 01021281823174  
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 Mei 2000

Alamat : Perumahan Dream's Land 1,  
Blok e No 51, Karya Muliya,  
Sematang Borang, Kota  
Palembang, Provinsi Sumatera  
Selatan

No. *Handphone* : 082217609291  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Tinggi Badan : 159 cm  
Berat Badan : 45 kg  
Email : cindyprmt23@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

- 2006-2012 : SD Negeri 33 Talang Kelapa
- 2012-2015 : SMP Negeri 51 Palembang
- 2015-2018 : SMK Perbankan Alumnika Palembang
- 2018-2022 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Sriwijaya

### Beasiswa

- Beasiswa Bidikmisi (2018)

### Pengalaman Organisasi

- Anggota Divisi Kerohanian dan Sosling IMEPA FE Unsri 2020-2021
- Bendahara Umum IMEPA FE Unsri 2021-2022

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	11
1.3    Tujuan Penelitian.....	11
1.4    Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1    Landasan Teori .....	13
2.2    Konsep dan Definisi .....	14
2.3    Penelitian Terdahulu.....	21
2.4    Kerangka Pikir.....	25
2.5    Hipotesis .....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	28
3.1    Ruang Lingkup Penelitian .....	28
3.2    Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3    Metode Pengumpulan Data .....	28
3.4    Teknik Analisis.....	29
3.5    Definisi Operasional Variabel .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1    Hasil Penelitian.....	38
4.2    Pembahasan .....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	65

5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....		66
LAMPIRAN.....		72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2021 di Provinsi Sumatera Selatan.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Pinjaman Daerah (PD) Tahun 2010-2021 di Provinsi Sumatera Selatan .....	8
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Provinsi Sumatera Selatan.....	39
Tabel 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Identifikasi Persamaan Simultan .....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Persamaan Ke-1 (PAD).....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Persamaan Ke-2 (Pinjaman Daerah) .....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji 2SLS .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Analisis Simultan Antara Pinjaman Daerah (PD) dan Pinjaman Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan .....	25
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Gambar 4.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	40
Gambar 4.3 Pertumbuhan Pinjaman Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	42
Gambar 4.4 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	44
Gambar 4.5 Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	45
Gambar 4.6 Pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	47
Gambar 4.7 Pertumbuhan Surplus/Defisit Anggaran Provinsi Sumatera Selatan 2007-2021 (dalam miliar rupiah).....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Dalam Regresi.....	72
Lampiran 2 Uji Autokorelasi Persamaan PAD.....	73
Lampiran 3 Uji Normalitas Persamaan PAD.....	73
Lampiran 4 Uji Multikoleniaritas Persamaan PAD.....	74
Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas Persamaan PAD.....	74
Lampiran 6 Uji Autokorelasi Persamaan Pinjaman Daerah.....	75
Lampiran 7 Uji Normalitas Persamaan Pinjaman Daerah.....	75
Lampiran 8 Uji Multikoleniaritas Persamaan Pinjaman Daerah.....	76
Lampiran 9 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Pinjaman Daerah.....	76
Lampiran 10 Uji Simultanitas (Hausman) Persamaan PAD.....	77
Lampiran 11 Uji Simultanitas (Hausman) Persamaan Pinjaman Daerah.....	77
Lampiran 12 Uji 2SLS Persamaan PAD.....	78
Lampiran 13 Uji 2SLS Persamaan Pinjaman Daerah.....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia telah melakukan pelaksanaan otonomi wilayah sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk penyelenggaraan sistem pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah dengan merata. Sejak ini diberlakukan, otonomi wilayah di Indonesia tentu mengalami pasang surut akibat perubahan politik termasuk juga adanya kewenangan dari setiap daerah (Sufianto, 2020). Tingkat otonomi wilayah berkorelasi positif dengan pendapatan daerah relatif, pangsa penduduk daerah, ketersediaan sumber daya alam dan ketidaksetaraan antarpribadi daerah (Sambanis dan Milanovic, 2014). Aplikasi otonomi wilayah ini dibutuhkan karena daerah tidak bisa terus bergantung dengan pemerintah pusat (Hardiningsih dan Oktaviani, 2013). Dewasa ini begitu banyak usulan atau masukan perluasan wilayah yang dimaksudkan untuk mempersingkat rentan kendali dan mempercepat proses pembangunan.

Salah satu sumber pendanaan untuk usulan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bisa dicermati sebagai sebuah kriteria atau indikator untuk melihat taraf ketergantungan wilayah kepada pemerintah pusat, sehingga jika terjadi peningkatan PAD maka akan meningkat juga taraf kemandirian daerah tadi. Selanjutnya, upaya menangani permasalahan dalam sumber pendanaan yang berasal dari PAD dapat diatasi dengan cara membuat perencanaan anggaran khususnya dari sisi pengeluaran agar pembangunan daerah serta keberhasilan perekonomian dapat dicapai. Terdapat beberapa indikator keberhasilan

perekonomian yaitu (1) pendapatan per kapita, (2) indikator sosial, (3) indeks kualitas hidup, (4) indikator susenas inti dan (5) indeks pembangunan manusia (Arsyad, 2010). Indikator ini tentu dapat tercapai dengan bergotong royong antara pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama memaksimalkan strategi peningkatan PAD baik itu dari sisi pajak, retribusi ataupun lainnya dan yang kedua merealisasikan model strategi peningkatan PAD tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. PAD sangat perlu diperhatikan karena jika tidak, bisa saja kebutuhan daerah yang tak seimbang dengan kapasitas fiskalnya akan menimbulkan kesenjangan fiskal (Worumi, 2018). Kesenjangan fiskal merupakan ketidakseimbangan atau adanya perbedaan antara kapasitas dan kebutuhan (Solihin dan Lesatri, 2010). Kesenjangan fiskal dapat diartikan juga dengan situasi dimana satu atau lebih pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam memperoleh pendapatan (*revenue*) yang cukup untuk mendanai program kerjanya, sementara pemerintah lain memiliki pendapatan (*revenue*) berlebih untuk mendanai program kerja tersebut.

Diberikannya tanggung jawab ke pemerintah daerah setempat dalam memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah selaras dengan kemampuan daerahnya, demi terciptanya sebuah desentralisasi merupakan tujuan utama dari PAD. Demi mencapai tujuan tersebut, tentulah ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi PAD yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan pinjaman daerah. PDRB menjadi salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan serta perubahan struktur ekonomi daerah. Menurut Juliansyah dan Sulkadria (2018),

PDRB akan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan PAD. Sebab PDRB yang baik merupakan cerminan perekonomian yang juga baik (Nur, 2019). Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), ada tiga (3) cara untuk meningkatkan PDRB yaitu (1) memperkuat neraca perdagangan, (2) memperkuat permintaan masyarakat domestik dan (3) melakukan transformasi struktural.

Selanjutnya, selaras dengan PDRB terdapat pula faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap PAD yaitu belanja modal. Peningkatan aset daerah berupa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik dapat dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal. Anggaran ini membuat pemerintah bisa memungut pajak maupun retribusi di daerahnya sebagai upaya meningkatkan PAD (Darwanis dan Saputra, 2014). Sehingga semakin besar belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu daerah, maka PAD juga akan semakin baik.

Selain PDRB dan belanja modal, pinjaman daerah juga memiliki pengaruh terhadap PAD. Pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerahnya serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Menurut Surya (2016), semakin besar suatu daerah melakukan pinjaman maka PAD daerah tersebut akan menurun karena adanya kinerja yang melambat. Oleh sebab itu, suatu daerah harus mengkaji potensi daerahnya agar PAD semakin tinggi sehingga pemerintah setempat dapat menjamin pengembalian pinjaman daerah baik pinjaman jangka pendek, menengah maupun panjang.

Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 10 besar dengan PAD tertinggi di Indonesia dan bisa dikatakan cukup berpotensi (BPS, 2021). Potensi tersebut dapat dicapai melalui pembentukan BUMD, kemitraan maupun *Participating Interest* (PI). Melansir data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang dirangkum dalam Tabel 1.1, PAD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Menurut Prabowo (2020) selaku Sekjen Kemendagri, peningkatan PAD sebagai salah satu acuan dalam mensukseskan program prioritas nasional. Program tersebut terdiri atas ketahanan ekonomi, pengembangan daerah, sumber daya terbaik serta berdaya saing, mental revolusioner dan pengembangan kebudayaan, penguatan infrastuktur, pembangunan lingkungan hayati dan yang terakhir merupakan stabilitas politik aturan serta transformasi publik.

**Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2021 di Provinsi Sumatera Selatan dalam Miliar Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Perkembangan</b>
2007	925.03	2.73
2008	964.68	39.65
2009	1,171.64	206.97
2010	1,994.16	822.52
2011	1,849.12	-145.04
2012	2,001.71	152.59
2013	2,021.70	19.98
2014	2,422.67	400.98
2015	2,534.53	111.85
2016	2,546.18	11.65
2017	3,031.63	485.46
2018	3,528.01	496.38
2019	3,494.51	-33.50
2020	3,375.10	-119.41
2021	3,865.46	490.36

*Sumber : DJPK Kemenkeu, 2021 data diolah*

Berdasarkan Tabel 1.1, PAD tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan kenaikan sebesar 822,52 miliar rupiah yang dikarenakan adanya bantuan dana dari pemerintah pusat serta sumber-sumber penerimaan PAD yaitu retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, pajak daerah dan pendapatan dari pengembalian juga ikut meningkat. Nilai tersebut meningkat sekitar 0,04 persen dari yang ditargetkan, selanjutnya pada tahun 2010 juga pembangunan di Sumatera Selatan cukup sukses dengan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 2.073 proyek. Keseluruhan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut adalah Rp 2.121.336,23 juta (BPS, 2021). Sedangkan terjadi penurunan PAD pada tahun berikutnya yaitu 2011 sebesar -145,04 miliar rupiah, disebabkan sumber-sumber penerimaan PAD khususnya pajak menurun selain itu pada tahun 2020 juga terjadi penurunan sebesar 119,41 persen dikarenakan tidak sepenuhnya dana APBD terserap sempurna sehingga adanya kesenjangan antara yang dilaporkan dengan realisasi (BPS, 2021).

Meskipun secara keseluruhan PAD Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan serta penerimaan pajak dan retribusi daerah juga bisa menunjang PAD di Provinsi Sumatera Selatan, namun pemerintah tetap memutuskan untuk melakukan pinjaman daerah dengan alasan semakin bertambahnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah sehingga membuat keadaan cukup tidak terkontrol. Pinjaman daerah diartikan sebagai sumber alternatif dana APBD yang digunakan untuk menutupi kekurangan APBD, biaya pengeluaran dan/atau tidak cukupnya kas daerah. Suatu daerah dengan perekonomian yang cukup berkembang

membuat tingginya permintaan masyarakat akan barang maupun jasa, kondisi ini menuntut pemerintah setempat untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tingginya permintaan barang dan jasa tadi akan ditutupi pemerintah dengan cara melakukan pinjaman (Oktaviani, 2018). Provinsi Sumatera Selatan saat ini harus menghadapi keterbatasan APBD, sehingga pemerintah akhirnya mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah Nasional atau yang selanjutnya disingkat dengan PEN senilai Rp 1,49 triliun (Wulandari, 2021). Pinjaman PEN ini diharapkan dapat menstabilkan perekonomian khususnya di masa-masa yang terdesak serta dapat digunakan pula untuk pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Selain mengajukan pinjaman PEN, ada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengajukan serta meminjam dana dari luar negeri.

Berdasarkan data Perwakilan Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan (DJPb), ada tiga daerah yang melakukan pinjaman ke luar negeri yaitu Kota Palembang sebesar Rp 64,93 miliar, Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 97,14 miliar dan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 263 miliar yang saat ini Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas sedang dalam masa pelunasan sedangkan Kabupaten Muara Enim masih berlanjut dengan tempo enam bulan sekali. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, peran pinjaman daerah ialah untuk menyerahkan unsur pembiayaan untuk pemerintah daerah agar perekonomian daerah tumbuh, berjalan cepat dan lancar serta juga untuk peningkatan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan.

Selain peran tersebut, terlihat juga beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kebijaksanaan pinjaman daerah yaitu : (1) meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah yang bersifat pelayanan *public* dan pemulihan biaya (*cost recovery*) (2) peningkatan potensi daerah dalam menggali potensi untuk pendapatan daerah sendiri yang selanjutnya dapat menaikkan potensi dalam membayar pinjaman daerahnya dan (3) memilih proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan (*recovery investment*) baik secara langsung maupun tidak langsung (Indrayenti, dkk, 2011).

Pada Tabel 1.2 menunjukkan data penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2010-2020 di Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan pinjaman daerah ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Oktaviani (2018), pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu wilayah akan mempengaruhi pinjaman daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa antara pinjaman daerah dan PAD saling mempengaruhi satu sama lain, semakin tinggi suatu daerah melakukan pinjaman maka akan semakin rendah PADnya yang disebabkan untuk membayar atau menjamin pinjaman tersebut begitupun kebalikannya.

**Tabel 1.2 Perkembangan Pinjaman Daerah (PD) Tahun 2007-2021 di Provinsi Sumatera Selatan dalam Miliar Rupiah**

<b>Tahun</b>	<b>PD</b>	<b>Perkembangan</b>
2007	2,022.10	146.60
2008	3,721.20	1,699.10
2009	2,236.50	-1,484.70
2010	2,500.00	263.50
2011	3,534.06	1,034.06
2012	2,289.75	-1,244.31
2013	2,525.96	236.21
2014	2,467.92	-58.04
2015	9,624.51	7,156.59
2016	5,950.00	-3,674.51
2017	5,350.00	-600.00
2018	3,214.84	-2,135.16
2019	5,152.31	1,937.47
2020	5,977.72	825.41
2021	3,948.53	-2,029.19

*Sumber : DJPK Kemenkeu, 2021 data diolah*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat penurunan pinjaman daerah terjadi pada tahun 2016 sebesar -3,674.51 miliar rupiah yang diakibatkan terjadinya kekurangan dana sehingga pemerintah melakukan pinjaman (DJPK, 2021). Jika dilakukan perbandingan dengan penerimaan PAD pada tahun serupa, ternyata begitu besar pengaruh pinjaman daerah terhadap PAD. Sedangkan kenaikan pinjaman daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,156.59 miliar rupiah yang diakibatkan terjadinya penurunan APBD, kenaikan ini juga memberikan pengaruh cukup besar yang dibuktikan dengan data pada APBD yaitu menurunnya beberapa pajak dengan sumbangan terbesar terhadap PAD serta meningkatnya pengeluaran pemerintah di tahun tersebut. Pinjaman atau utang yang terlalu besar ini tentu tidak baik untuk perekonomian. Menurut Reinhart dan Rogoff (2010), utang akan mengurangi atau menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Izzah (2012) memaparkan hasil penelitiannya dimana PAD mempengaruhi pinjaman daerah yang dalam hal ini pemerintah daerah hanya mempertimbangkan faktor keuangan saja dalam mengambil kebijakan pinjaman daerah sedangkan faktor makro ekonomi tidak dipertimbangkan dalam melakukan pinjaman daerah dengan alasan faktor makro ekonomi tidak berpengaruh secara langsung pada anggaran pemerintah daerah. Mampu atau tidaknya suatu daerah dalam membayar pinjaman daerah ialah hal inti yang wajib menjadi perhatian. Selain PAD, ada juga indikator yang mempengaruhi pinjaman daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan surplus/defisit anggaran. Menurut Harnasari (2012) DAU berpengaruh terhadap pinjaman daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU akan diiringi dengan peningkatan pinjaman daerah.

Selanjutnya ialah surplus/defisit anggaran. Surplus/defisit anggaran merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Menurut penelitian Balaguer (2013), budget atau surplus/defisit anggaran merupakan variabel yang mempengaruhi utang daerah. Pernyataan ini dapat diartikan jika penerimaan pemerintah lebih kecil dibanding dengan pengeluaran pemerintah, maka akan terjadi defisit yang akan mendorong pemerintah setempat untuk melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif penyeimbangan neraca keuangannya. Sehingga semakin besar defisit suatu daerah, maka akan semakin besar juga pinjaman daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya dalam meningkatkan perekonomian daerahnya meskipun sempat mengalami resesi di

tahun tertentu. Pada 2020, PAD dan belanja pemerintah daerah mengalami tren perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan inilah yang membuat pemerintah setempat melakukan pinjaman daerah. Meskipun pinjaman daerah dijadikan alternatif pembiayaan, namun ternyata hal ini justru membuat inflasi Sumatera Selatan meningkat. Berdasarkan laman Bank Indonesia, peningkatan ini terjadi karena permintaan masyarakat yang ikut meningkat. Pernyataan ini diperkuat dengan alasan pemerintah melakukan pinjaman ialah untuk infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air juga pariwisata. Sehingga memicu pertanyaan tentang peran pinjaman daerah terhadap PAD.

Sejatinya, melakukan pinjaman daerah tidak sepenuhnya salah asalkan daerah tersebut mampu untuk menyeimbangkan antara pengeluaran yang wajib dilakukan dengan pengeluaran yang mungkin saja bisa ditunda terlebih dahulu. Selain itu, pentingnya perhatian lebih terhadap kaitan antara pinjaman daerah dan PAD di Sumatera Selatan agar perekonomian daerah semakin membaik sehingga tidak perlu lagi melakukan pinjaman. Sebab jika alasan utama melakukan pinjaman adalah untuk menopang APBD, maka sewajibnya pemerintah harus melakukan pemetaan untuk mengukur fleksibilitas yang diwenangi oleh pemerintah daerah dalam pengalokasian APBD demi mendanai kegiatan yang dijadikan prioritas di daerahnya atau lebih dikenal dengan sebutan ruang fiskal (*fiscal space*). Berdasarkan penjelasan, data dan fakta yang sudah dijabarkan di atas, ternyata perlu dilakukan pengkajian serta penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara Pinjaman Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertumpu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang tepat ialah:

1. Bagaimana hubungan antara pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana hubungan antara DAU dan surplus/defisit anggaran terhadap pinjaman daerah Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana hubungan antara PDRB dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah :

1. Untuk menganalisis hubungan antara pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan.
2. Untuk menganalisis hubungan antara DAU dan surplus/defisit anggaran terhadap pinjaman daerah Sumatera Selatan.
3. Untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis sendiri yaitu berupa pengalaman, berupa gambaran jika ingin melakukan penelitian serupa dan dapat memberikan pandangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat kebijakan untuk perekonomian yang lebih baik.

#### **1. 4. 1 Manfaat Teoritis**

- Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam perluasan ilmu Ekonomi Keuangan Daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan Penerimaan Pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.
- Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi penulis selanjutnya.
- Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pengaruh pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1. 4. 2 Manfaat Praktis**

- Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan sedikit gambaran dan bukti bahwa terjadi hubungan simultan antara pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan.
- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari serta memahami bagaimana pengalokasian penerimaan daerah di Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiwardani, D. H. (2021). *Analisis Pengaruh Utang Daerah, Investasi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB di Kabupaten Lumajang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anonymous. (2002). Fiscal Prospects for The Federal and Provincial/Territorial Governments, Economic Performance and Trends. *Legal Deposit, Bibliotheque Nationale du Quebec*, 1–14.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2021). *Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Balaguer, Tortosa, E., & Diego. (2013). *On the Determinants of Local Government Debt: Does One Size Fit All*. Spain: Jaume I University.
- Basri, S. (2005). *Teori Pengeluaran Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Basri, Y. Z., & Subri, M. (2005). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 2*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media.
- Darwanis, & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *APBD Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan: DJPK.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Pinjaman Daerah Bidang Infrastruktur Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah*. Palembang: DJPK.
- DJKN Kemenkeu. (2014). *Mekanisme Debt Swap to Investment untuk Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM*.
- Dumairy. (1997). *Perekonomian Indonesia Cetakan ke 5*. Jakarta: Erlangga.
- Fauzi, A., & Iskandar. (1995). *Cara Membaca APBN*. Malang: Brawijaya University Press.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2001). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Handoyo, R. D. (2010). Penerimaan PAD di Jawa Timur, Efisienkah? *Majalah Ekonomi*, 1(1), 1–19.
- Hardiningsih, & Oktaviani. (2013). Implementasi Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM Wilayah Semarang). *Public Knowledge Project*, 1–11.
- Harian Sumatera Ekspres. *Tiga Daerah Miliki Utang Luar Negeri*. Jumat, 27 Juli 2018, hal 17.
- Harnasari, E. J. (2012). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Brawijaya.
- Hertanto, I., & Sriyana, J. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 76–89.
- Hibzon. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–14.
- Hikmahyanti, N., & Soelistyo, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(4), 665–677.
- Ilmiddaviq, M. B. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 134–147.
- Indrayenti, Prihastuti, E. S., & Budiman, F. (2011). Kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Membayar Pinjaman Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 61–78.
- Insukindro, M., Widayat, W., Jaya, W. K., Purwanto, B., Halim, A., Suprianto, J., & Purnomo, A. B. (1994). *Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yogyakarta: Laporan Hasil Penelitian KKD, FE-UGM.
- Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1).
- Izzah, N. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Daerah di Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa*

*Tengah Tahun 2007-2009*). Universitas Jember.

- Jhingan, M. (1993). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jolianis, Yolamalinda, & Oktari, D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Pendidikan Ekonomi*, 1(1), 1–9.
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(2), 58–62.
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurrohman, T. (2009). Determinan Pinjaman Kebijakan Daerah Studi Kasus di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (JAB)*, 9(2).
- L.K., D. H., Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 1240–1254.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik, Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics Ninth Ed*. South: Worth Publishers.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Pengantar Ekonomi Makro, Alih bahasa: Chriswan Sungkono*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marizka, Reza. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*. Universitas Negeri Padang.
- Mudaya, D. A. S. (2017). *Analisis Surplus (Defisit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dampaknya Terhadap Pinjaman Pemerintah Daerah di Kabupaten Banggai*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Mulyono, I., & Ritonga, I. T. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pinjaman Daerah : Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Universitas Gadjah Mada.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nisa, Zulfatun., & Bahari, Fitri. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 13(1), 90-99.

- Nur, I. M. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Oktaviani, A. N. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. *Economic Development Analysis Journal*, 7(3), 305–313.
- Paul A, S., & Nordhaus, W. D. (1993). *Mikro Ekonomi Terjemahan Drs. Haris Munandar DKK. Edisi ke-14*. Jakarta: Erlangga.
- Prabowo, H. (2020). *Peningkatan PAD untuk Sukseskan Program Prioritas Nasional*. Jakarta: Kemendagri.
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Journal of Economics and Policy*, 8(1), 88–99.
- Reinhart, C. P., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 100, 573–578.
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus Jilid Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara, Sosial Humaniora*, 7(2), 49–57.
- Rosidan, I. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Barlingmascakeb 2009-2017*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Saldi, A. H., Zulgani, & Nurhayani. (2021). Analisis Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 201–210.
- Sambanis, & Milanovic. (2014). Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries. *Journals Sage*, 47(13), 1830–1855.
- Santosa, P. B., & Rahayu, R. P. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 9–18.
- Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134.
- Sarwono, J. (2006). *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS-13, Edisi*

*Pertama*. Yogyakarta: Andi.

- Simanjuntak, J. P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: FEUI.
- Simanjuntak, T. H. (2009). Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance ) dan Bagi Hasil Pajak Dalam Perekonomian di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(2), 1–8.
- Singgih, R., & Hutahaean, P. (1997). Strategi Pemantapan Keuangan Daerah dan Kebijakan Desentralisasi : Suatu Analisis tentang Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, 4(2), 7–41.
- Solihin, A., & Lestari, N. A. (2010). Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*, (1), 20–35.
- Sroyer, S., & Mawar. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(1), 40–53.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338–1357. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sudarmanto, R. G. (2005). *Analisis Regresi Linier Ganda dengan SPSS, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarti, Ahmad. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *MIMBAR*, 28(1), 39-46.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (2001). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPEE.
- Surya, B. C. (2016). Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman Terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 69–83.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka

Cipta.

Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P., & Stephen C, S. (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004. (2004). *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Vialeta, P., Azwardi, & Asngari, I. (2015). Hubungan Simultan Sumber Penerimaan Daerah, Belanja Modal, dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Economic & Development*, 32(2), 107–118.

Wadjaudje, D. U., Susanti, S., & Pahala, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2), 105–128.

Widyatama, A. (2020). *Tantangan Pinjaman Daerah*. Malang: Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya.

Worumi, H. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23–39.

Wulandari, D. (2021). *Pemda di Sumsel Ajukan Pinjaman PEN Rp 1.49 Triliun*. Berita Bisnis Sumatera.